

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan 3 konsep pelaksanaan kebijakan yang tercantum dalam peraturan bupati, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, dilihat dari konsep objektivitas yaitu calon penerima penghargaan wajib melakukan runtutan tahap seleksi. Mulai dari memenuhi berkas persyaratan melalui website mapres, uji kompetensi berbasis CAT dan wawancara. Setelah dinyatakan lulus dari ketiga tahapan tersebut maka ditetapkan sebagai penerima penghargaan mahasiswa berprestasi.
2. Kedua, dilihat konsep transparansi yaitu penyelenggaraan kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri menyebarkan informasi pelaksanaan kebijakan melalui sosialisasi dari berbagai bentuk mulai dari mengadakan forum diskusi, pemasangan baliho, penggunaan *tv wall* hingga bekerja sama dengan perkumpulan mahasiswa Kabupaten Wonogiri untuk menyosialisasikan kebijakan. Selain itu penyebaran pamflet melalui instagram dan terdapat *booklet*

panduan pelaksanaan kebijakan yang dapat *download* pada media *internet*. Kemudian untuk menciptakan keterbukaan, pengumuman penerima penghargaan secara langsung disiarkan oleh media pemda. Disisi lain terdapat kekurangan dalam publikasi rekap hasil perolehan nilai calon penerima sehingga menyebabkan pelaksanaan seleksi dinilai kurang adil.

3. Ketiga, dilihat konsep akuntabilitas pada pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi, penerima penghargaan *dimonitoring* secara langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui penggunaan dana berbentuk laporan pembelanjaan yang disertai nota atau kwitansi yang mewajibkan dikumpulkan oleh penerima penghargaan.

Sedangkan menentukan keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi dilihat dari 3 unsur kesesuaian implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, kebijakan itu sendiri yaitu kesesuaian kebijakan berdasarkan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pokok permasalahan Kabupaten Wonogiri yaitu adanya kesenjangan pendidikan. Untuk menyikapi permasalahan tersebut hadirilah kebijakan pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi berupa bantuan biaya pendidikan kuliah bagi pemuda Kabupaten Wonogiri yang bertujuan memberikan kesempatan dan sebagai pemerataan menempuh pendidikan bagi mahasiswa Kabupaten

Wonogiri sehingga dapat menciptakan SDM di Kabupaten Wonogiri yang lebih berkualitas. Selain itu, Kabupaten Wonogiri memiliki anggaran yang cukup besar sehingga mampu menunjang pelaksanaan kebijakan. Untuk itu kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Wonogiri.

2. Kedua, beban yang ditentukan dalam kebijakan sesuai dengan kemampuan implementor. Artinya implementor mampu melaksanakan kebijakan dengan baik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri selaku implementor dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan 3 konsep pelaksanaan yang tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 yaitu objektif, transparan dan akuntabel. Selain itu upaya memperlancar penyelenggaraan kebijakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri bekerja sama dengan pihak ketiga yang lebih profesional untuk menjalankan tahapan seleksi penerima penghargaan mahasiswa berprestasi. Tujuan kerjasama dengan pihak ketiga agar pelaksanaan kebijakan lebih independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lainnya. Sayangnya kerjasama yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dengan CV. Archen justru menjadi bumerang bagi Dinas Pendidikan, hal itu dikarenakan Dinas Pendidikan sepenuhnya mempercayai pihak ketiga untuk menjalankan tahapan seleksi sehingga kurang memahami sistem

penilaian yang dilakukan oleh pihak ketiga. Imbasnya penilaian yang diperoleh calon mahasiswa ketika pelaksanaan tahap seleksi yang seharusnya dapat terpublikasi namun menjadi tidak transparan.

3. Ketiga kesesuaian kelompok sasaran dengan pelaksana yaitu kelompok sasaran mampu untuk memenuhi ketentuan yang diputuskan oleh pelaksana. Ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Kesanggupan tersebut dapat diketahui dari sebanyak 600 mahasiswa mampu memenuhi dan melengkapi runtutan tahapan seleksi yang kemudian ditetapkan sebagai mahasiswa berprestasi karena mampu melewati seluruh tahapan seleksi. Selain itu, 395 mahasiswa mampu mempertahankan IPK yang telah ditentukan untuk melanjutkan sebagai penerima beasiswa lanjutan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi yang berlandaskan pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi diterapkan sesuai dengan konsep objektif, transparan dan akuntabel. Sedangkan implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi telah berhasil karena mampu memenuhi 3 unsur kesesuaian yaitu kesesuaian kebijakan dengan masyarakat, kesesuaian pelaksana dengan kebijakan dan kesesuaian

pelaksana dengan masyarakat. Namun penerapan kebijakan perlu dievaluasi kembali, agar memperbaiki kesalahan sehingga dapat meningkatkan kualitas sistem seleksi pada pelaksanaan kebijakan.

4.2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan uraian sebelumnya, maka peneliti berkeinginan untuk memberi saran sebagai masukan yang dapat dijadikan evaluasi dari keberlanjutan implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di Kabupaten Wonogiri. Berikut sudut pandang yang perlu diperbaiki dalam proses pelaksanaan kebijakan menurut peneliti:

1. Bagi pelaksana lebih meningkatkan pengawasan dan kritis terhadap *output* yang diberikan oleh pihak ketiga.
2. Bagi pelaksana memberikan penegasan atas kewajiban penerima penghargaan dan menindak lanjuti gagasan inovatif yang telah dibuat dalam karya tulis sebagai upaya mengembangkan daerah.